

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidak lepas dari peran berbagai organisasi masyarakat, khususnya yang berfokus pada aspek keagamaan. Sejak awal abad ke-20, organisasi berbasis Islam mulai berkembang, seperti Sarekat Islam (SI) yang berdiri pada 1911 dan menjadi pelopor dalam menggerakkan kesadaran nasional serta memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Kemudian, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 1926 sebagai respon terhadap dinamika sosial-keagamaan dan kolonialisme, dengan misi menjaga ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*¹, serta memperjuangkan kepentingan umat. Seiring berkembangnya NU, Gerakan Pemuda Ansor lahir pada 24 April 1934 sebagai sayap perjuangan NU, yaitu organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembinaan generasi muda Islam dan perjuangan melawan kolonialisme. (D. R. Astuti & Wibisono, 2022).

Keberadaan organisasi masyarakat terutama yang berbasis keagamaan memiliki peran krusial dalam sejarah perjuangan Indonesia dan pembangunan sosial. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Gerakan Pemuda Ansor tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga aktif dalam bidang

¹ *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan paham keislaman yang berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, serta berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Aswaja berprinsip pada tiga aspek utama: akidah (mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi), fiqih (mengikuti empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), dan tasawuf (mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali). Paham ini menekankan moderasi (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), dan keadilan (*adl*), serta menjadi landasan bagi NU dan Gerakan Pemuda Ansor dalam memahami Islam secara moderat dan inklusif.

pendidikan, sosial, dan politik, yang secara kolektif memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Pentingnya organisasi-organisasi ini terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas sosial, menyediakan pendidikan dan pemberdayaan, menjaga nilai-nilai dan identitas budaya, serta mengadvokasi keadilan dan hak-hak sosial.

Selain itu, organisasi juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, interaksi antara pemerintah dan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam situasi seperti ini, organisasi masyarakat berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Keberadaan organisasi masyarakat, khususnya yang berbasis keagamaan, sosial, dan kepemudaan, menjadi wadah bagi penyaluran aspirasi rakyat serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah. Tidak hanya sekadar sarana komunikasi, organisasi juga berperan dalam menyelaraskan kebijakan negara dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan hubungan yang seimbang, dinamis, dan lebih inklusif antara pemerintah dan warga negara.

Salah satu organisasi yang memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat, khususnya dalam konteks keagamaan dan kebangsaan, adalah Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor merupakan organisasi otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada muktamar NU ke-9 pada tahun 1934. Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh keadaan masa itu, di mana mulai muncul organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong

Minahasa, dan organisasi kepemudaan lainnya. Selain itu juga muncul perbedaan pandangan mengenai tahlil, tlikin, taqlid, ijtiḥad, mazhab, serta furuqiyah lainnya. Sehingga pada tahun 1924 KH. Abdul Wahab mendirikan organisasi kepemudaan yang bernama Syuubanul Wathan atau sekarang lebih dikenal sebagai Gerakan Pemuda Ansor (Walidain, 2021).

Gerakan Pemuda Ansor beraqidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali); serta dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Landasan keagamaan ini menjadi pijakan utama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab organisasi, termasuk dalam membentuk serta mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh².

Sebagai bagian dari upaya mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Gerakan Pemuda Ansor berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian luhur, akhlak mulia, serta semangat patriotisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan yang mencakup aspek spiritual, intelektual, dan keterampilan, sehingga melahirkan individu yang sehat, terampil, ikhlas, dan beramal shalih. Selain itu, sebagai organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam bingkai Negara

² Data ini diambil dari Peraturan Dasar (PD) Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor

Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, Gerakan Pemuda Ansor juga mengambil peran aktif dalam pembangunan nasional dengan sikap kritis dan konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemakmuran, dan kemanusiaan, organisasi ini berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang bermartabat dan diridai oleh Allah SWT³. Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan menjaga stabilitas sosial mencerminkan keterlibatannya dalam penguatan *civil society*, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi dan kehidupan masyarakat modern.

Civil society, yang secara umum dipahami merupakan elemen penting dalam demokrasi dan penguatannya penting dalam kehidupan masyarakat modern. *Civil society* yang umumnya dipahami sebagai ruang di luar lingkup negara dan pasar melibatkan berbagai organisasi, kelompok, serta individu yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan publik, hak asasi manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, *Civil society* menjadi pilar penting dalam mendukung praktik demokrasi dan pembangunan sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Asrida et al., yang menegaskan bahwa masyarakat sipil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap demokrasi dan proses demokratisasi, meskipun ada risiko terjebak dalam etnosentrisme atau radikalisasi (Asrida & Marta, 2021).

³ Data ini diambil dari Peraturan Dasar (PD) Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor

Penguatan *civil society* menjadi semakin mendesak di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Dalam era informasi saat ini, *civil society* berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah dan korporasi (Setiawan & Warsa, 2018).

Muhammad AS Hikam sebagai salah satu pemikir yang membahas konsep *civil society* di Indonesia dengan merujuk pada pandangan Tocquville mendefinisikan *civil society* sebagai ruang dalam kehidupan sosial yang terorganisasi dan memiliki karakteristik tertentu. Di antaranya adalah adanya semangat kesukarelaan sosial (*voluntary*), kemampuan untuk tumbuh secara mandiri (*self-generating*), serta keswadayaan (*self-supporting*). Selain itu, *civil society* menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dalam hubungannya dengan negara sekaligus memiliki keterikatan kuat terhadap norma atau nilai-nilai hukum yang dijunjung oleh anggotanya (Suryani, 2015). Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan *civil society* berperan dalam mengontrol kekuasaan negara dan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, penguatan *civil society* menjadi tantangan besar di tengah maraknya polarisasi sosial, rendahnya literasi demokrasi, serta lemahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana konsep ini berperan dalam konteks Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya memiliki kondisi sosial politik yang menarik untuk dikaji dalam konteks penguatan *civil society*. Kota ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, didominasi oleh organisasi-organisasi berbasis keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Namun, meskipun memiliki

potensi besar dalam memperkuat *civil society*, Kota Tasikmalaya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik, serta meningkatnya fragmentasi sosial akibat perbedaan pandangan politik dan agama. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya mencapai 11,10% pada tahun 2024 (BPS Kota Tasikmalaya, 2024b). Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga mengalami penurunan, dari 86% pada Pilkada 2019 menjadi 76,91% pada Pilkada 2024 menurut data KPU Provinsi Jawa Barat⁴. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki basis keagamaan yang kuat, masyarakat Tasikmalaya masih menghadapi tantangan dalam keterlibatan aktif pada sektor sosial dan politik.

Dalam konteks ini, peran Gerakan Pemuda Ansor sebagai bagian dari *civil society* memiliki peranan penting dalam penguatan *civil society* untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, organisasi ini aktif menyuarakan ajaran Islam yang moderat (*wasathiyah*), yang mengedepankan semangat toleransi antarumat beragama serta menolak paham ekstremisme dan radikalisme. Peran ini menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan beragam secara keyakinan.

Selain itu, Ansor juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan kaderisasi kepemudaan. Melalui pelatihan seperti PKD (Pelatihan Kepemimpinan Dasar) dan Diklatsar Banser, organisasi ini membentuk generasi muda yang

⁴ Data persentase jumlah partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya pada Pilkada 2019 dan 2024 yang diambil pada laman Instagram KPU Provinsi Jawa Barat

memiliki wawasan kebangsaan, semangat kebhinekaan, serta kemampuan kepemimpinan yang kuat. Proses kaderisasi ini membekali para anggotanya dengan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Dalam konteks sosial, Gerakan Pemuda Ansor bertugas untuk menjalankan fungsi advokasi terhadap isu-isu publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Selain itu, melalui satuan tugasnya yaitu Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Gerakan Pemuda Ansor juga berkontribusi dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan di tengah masyarakat.

Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, Gerakan Pemuda Ansor tampil sebagai aktor kunci dalam memperkuat *civil society*. Kiprah organisasi ini mencakup aspek ideologis, sosial, politik, dan keamanan yang berkontribusi pada terbentuknya masyarakat sipil yang inklusif dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana peran Gerakan Pemuda Ansor dalam penguatan *civil society* khususnya di konteks lokal seperti Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi nyata Gerakan Pemuda Ansor dalam membangun masyarakat sipil yang inklusif dan demokratis di wilayah tersebut. Sebagai perbandingan, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabat Banuaji, Wiwik Widayati, dan Puji Astuti pada tahun 2013 dengan judul "Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam Penguatan *Civil Society* di Kabupaten Jepara" menemukan bahwa aktivitas organisasi ini cenderung lebih berfokus pada kegiatan seremonial daripada pada penguatan *civil society* secara langsung (Banuaji dkk., 2013). Temuan tersebut

menjadi pijakan awal untuk melihat apakah dinamika serupa juga terjadi di Kota Tasikmalaya atau justru menunjukkan pola dan peran yang berbeda.

Selanjutnya penelitian sebelumnya dari Wiji Astuti 2023 yang berjudul “Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam Membentuk Sosial dan Keagamaan pada Masyarakat beragam di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur” ini mengkaji tentang bagaimana peran Gerakan pemuda ansor dalam membentuk dan memperkuat nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang beragam melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan kerjasama lintas agama yang mencerminkan nilai moderasi dan toleransi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulisi, diantaranya adalah objek utama penelitian, kontribusi peran gerakan ansor dalam kehidupan masyarakat, serta toleransi dan nilai keislaman yang moderat. Namun terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber (W. Astuti, 2023).

Lalu penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Meylinda Afifah N. Tahun 2017 yang berjudul “Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2015” ini menjelaskan tentang peran Gerakan Pemuda Ansr dalam bidang sosial keagamaan yang berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat melalui program yang dilaksanakan serta menunjukkan dampak sosial dari peran gerakan pemuda ansor dalam kehidupan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah fokus utama penelitian, dimana penulis memiliki fokus pada penguatan *civil society* sedangkan fokus pada penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada peran gerakan pemuda ansor dalam kegiatan sosial

keagamaan, pendekatan yang digunakan juga berbeda dimana dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode *historical research*, dan teori yang digunakan juga berbeda yaitu teori perubahan sosial dari Kartodirdjo (Afifah N, 2017).

Maka dari itu terdapat kesenjangan atau celah dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam memahami bagaimana Gerakan Pemuda Ansor menggunakan modal sosialnya dalam memperkuat *civil society* di Tasikmalaya serta pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pengalaman subjektif anggota dan interaksi sosial dalam konteks lokal masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi yang berfokus pada bagaimana individu memahami dan menafsirkan realitas sosial mereka. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menggali pengalaman anggota Gerakan Pemuda Ansor dalam menjalankan peran mereka di tengah tantangan sosial yang ada. Metode fenomenologi Schutz akan membantu memahami bagaimana makna, tindakan, dan kesadaran kolektif yang terbentuk dalam organisasi ini dapat berkontribusi terhadap penguatan *civil society* di Tasikmalaya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana organisasi pemuda berbasis keagamaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat sipil yang inklusif, toleran, dan demokratis. Di tengah berbagai tantangan sosial seperti meningkatnya potensi intoleransi, polarisasi masyarakat, serta rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan, maka peran organisasi seperti Gerakan Pemuda Ansor menjadi relevan untuk ditegahi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian merumuskan permasalahan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini mengenai “Bagaimana modal sosial yang digunakan oleh Gerakan Pemuda Ansor dalam penguatan *civil society* di Kota Tasikmalaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana modal sosial yang digunakan oleh gerakan pemuda ansor dalam penguatan *civil society*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menambah kajian ilmiah tentang peran organisasi keagamaan, khususnya Gerakan Pemuda. Penelitian ini memperluas pemahaman akademik dengan menghadirkan perspektif organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang luas.

1.4.2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran dan evaluasi bagi Gerakan Pemuda Ansor dalam mengoptimalkan penguatan *civil society* di Kota Tasikmalaya.